

Kebijakan Pendidikan Terhadap Dimensi Politik Pendidikan

Devi Ade Rianty^{1*}, Wiene Surya Putra², Ricky Hidayat³
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah¹²³, Binjai, Indonesia
Email: *deviaderianty9@gmail.com*

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN.3026-6874 Vol. 1, Nomor. 2, Desember 2023 Halaman 776-782	<i>Politics and Policy are two important things in running government, including in the world of education. These two elements can influence the implementation of Islamic education as a whole. The history of politics and education policies in Indonesia has started since the beginning of this nation's independence, in fact political struggles and policies have existed since pre-independence. The development of politics and policy in the world of education in Indonesia has dynamics that are quite interesting to pay attention to in each period, starting from the beginning of independence to the dynamics of politics and education policy that occur today. Policy making in the education sector often becomes an arena for political elites to struggle for influence. As a result, politicization of education sometimes becomes unavoidable. On the other hand, efforts to (mainstream) education policy so that it can be aligned with policies in other fields are also not easy. For third world and developing countries, these efforts are not only faced with unsupportive political and cultural systems and acute economic problems. As a result, education policies are often defeated by other policies such as those in the fields of defense, security and the economy.</i>
Keywords: Policy Education Politics	

Abstrak

Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.

Kata Kunci : kebijakan, pendidikan, politik

PENDAHULUAN

Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Politik Pendidikan sebagai disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat tersebut di arahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Istilah politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik ditingkat lokal maupun nasional. Definisi ini dikemukakan Kimbroug dengan meminjam pengertian politik yang disampaikan Kammerer sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas.

Dalam perkembangan zaman, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun politik pendidikan di suatu negara; namun keseluruhan cara itu umumnya berawal dari komitmen para

penentu politik pendidikan itu sendiri, yang dalam hal ini antara lain ialah para elite politik, pejabat pemerintah serta para pengambil kebijakan negara. Mereka semua harus diketuk hatinya supaya memiliki komitmen yang memadai sehingga dapat bersikap "sadar didik" (*sense of education*). Dalam arti untuk menyadarkan betapa pentingnya pendidikan untuk membangun manusia dan bangsanya untuk lebih maju. Tanpa pendidikan (yang baik) tidaklah mungkin suatu bangsa dapat berkembang secara konstruktif dinamis.

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Untuk itu pendidikan sangat dibutuhkan selama manusia hidup, karena dalam hidup manusia akan terus belajar dan belajar untuk mampu menjalani hidupnya dengan sebaik mungkin

Dalam proses pembelajaran tidak lepas dari adanya penilaian dan pengukuran. Dengan mengetahui prestasi belajar peserta didik, maka kita dapat memetakan kemampuan anak didik di dalam kelas. Berbicara masalah prestasi belajar, pada dasarnya banyak para ahli yang mencoba memberikan pendapatnya untuk memperoleh suatu pengertian secara actual. Pengertian prestasi belajar mempunyai dua macam istilah yaitu prestasi dan belajar. Dengan demikian untuk merumuskan pengertian tersebut secara keseluruhan terlebih dahulu penulis kemukakan satu persatu kemudian secara keseluruhan.

Pentingnya kebijakan dalam pendidikan karena kebijakan dapat memberikan kontribusi yang jelas dan terarah. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, sebab untuk menjadi bangsa yang maju merupakan suatu cita-cita yang diharapkan pada suatu negara. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya, semakin maju pendidikan maka negara juga akan mengalami kemajuan yang pesat.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang didapatkan dari tulisan-tulisan para ahli dalam pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang sangat penting untuk memajukan pendidikan. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan. Subyek yang menjadi sumber utama adalah kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan dalam pendidikan. Hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli dalam pendidikan, dengan membaca buku dan jurnal yang terkait. Buku dan jurnal digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data-data terkait kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa sehingga dapat diambil dijadikan sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi. Kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.

Dalam konteks kenegaraan, istilah kebijakan pendidikan dipahami sebagai apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya suatu visi, misi dan tujuan pembangunan di bidang pendidikan. Dalam hal ini merupakan bagian dari kebijakan negara berupa keputusan dibidang pendidikan yang mengatur bagaimana bertindak yang biasanya menjadi keputusan policianal (keputusan kebijakan) yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah, program dan rencana baik jangka panjang, menengan maupun pendek.

Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang kebijakan yaitu:

1. Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa:
"Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkanan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada."
2. Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) mengatakan bahwa:
"Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran."
3. Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa:
"Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan"

Kebijakan (Pendidikan) merupakan penerapan analisis dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran (alternatif solusi) dalam rangka memecahkan masalah publik sebagai bentuk proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi data (masalah dibidang pendidikan) untuk merumuskan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pendidikan. Bentuk kegiatannya bisa berupa pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data dalam bidang pendidikan untuk masukan yang penting bagi pengambil kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah diesepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah di desain. Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya,

Implementasi kebijakan akan terlihat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapain tujuan pendidikan. Dari semua rangkaian perumusan kebijakan pendidikan, maka proses

implementasi ini lah yang menjadi tahapan yang lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah. Proses implementasi kebijakan pendidikan terdiri umumnya menggunakan empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya. Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cenderung kaku;
2. Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan di bandingkan penataan struktur pelaksana. Sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan;
3. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah perilaku manusia. Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik;
4. Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun menghambat penerapan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Dalam mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, politik pendidikan juga memiliki kaitan mengenai pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dimana Politik Pendidikan (politics of education) adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya. Politik Pendidikan sebagai disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang

menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat tersebut di arahkan.

Kimbrough menjelaskan, bahwa *"the politic of eduction is the process of making basic educational decision of local distrist wide, state wide or nation wide significance"*, bahwa politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat local maupun di tingkat nasional. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya kajian pada ranah Pendidikan politik memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):
 - a. Pendidikan Islam tersebut hanya memiliki fokus pendidikan Islam, bukan pendidikan secara umum, melainkan pendidikan yang spesifik di dalam Islam. Yakni, relasi antara negara dengan pendidikan yang berupa Pendidikan yang dialami oleh umat Islam, pendidikan mengenai agama Islam, Pendidikan yang berlangsung di kalangan umat Islam, atau pendidikan yang diinginkan oleh umat Islam.
 - b. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik - Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan:
 - a. Peranan insani setiap individu sebagai waarganegara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat. Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara-negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya Republic yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (long life education).

Pengajaran dalam pengertian luas juga merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun. Secara harfiah arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika-akhlak, serta menggali pengetahuan setiap individu. Pengajaran yang diberikan pada peserta didik bukan saja dari pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, namun dalam hal ini fungsi keluarga serta masyarakatlah yang amat penting dan menjadi wadah pembinaan yang bisa membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan serta pemahaman

Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya kebijakan pendidikan dengan politik pendidikan itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai kebijakan dan politik pendidikan yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan mendapatkan pendidikan kebijakan dan pendidikan politik, sebenarnya orang mendambakan kekuatan intelektual dan fisik untuk ikut mengausai kondisi sosial-politik, bahkan juga ikut memberikan tekanan/presi. Selanjutnya, berdasarkan hak-hak asasi manusia, dalam pendidikan politik itu terdapat dimensi keterbukaan yang prinsipil menuju ke masa-masa yang akan datang yang lebih baik lagi

KESIMPULAN

Pendidikan politik adalah upaya menyadarkan masyarakat dari belenggu yang dibuat oleh manusia bagi manusia lainnya. Dengan adanya pendidikan di harapkan seluruh warganegara dapat sadar dan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam berpolitik, mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan, memaksimalkan hak mereka, melaksanakan kewajiban mereka, dan juga turut berpartisipasi dalam segala bentuk aktivitas politik.

pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan secara merata tanpa harus memandang latar belakang masyarakat. Pendidikan politik adalah tugas negara, sebaiknya tidak disalahgunakan untuk mendoktrin rakyat, tetapi digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan rakyat terhadap politik sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Sedangkan Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk

menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

REFERENCES

- Abdul Hakim (2019), *Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam*.
<https://C:/Users/ACER/Downloads/4411-Article%20Text-12804-1-10-20210427.pdf>
- Abdul Rozak (2021), *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, Vol 3, No.2
<https://media.neliti.com/media/publications/363341-none-70d4c60b.pdf>
- Ahmad Zain Sarnoto (2012), *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*, EDUCHILD. Vol.01 No.1.
<https://media.neliti.com/media/publications/22931-ID-konsepsi-politik-pendidikan-di-indonesia.pdf>
- Angelika Bule Tawa, *Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar*,
<https://C:/Users/Acer/Downloads/08+Kebijakan+Pendidikan+Nasional+Dan+Implementasinya+Pada+Sekola+Dasar.Pd>
- Desi Pristiwanti, dkk (2022), *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4. No. 6.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9498/7322>
- Diskon silitonga (2010), *Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pendidikan Perspektif Politik Diindonesia*. Vol. 13 No. 3.
<https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/188>
- Fadiyah elwijaya, dkk (2021), konsep dasar kebijakan pendidikan Vol.6 No. 1. 67-71
<https://C:/Users/ACER/Downloads/817-2306-1-PB.pdf>
- Hafidati, Putri. (2020). *Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. V. No. 1. 64-79. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Jurnal-Magister-Ilmu-Hukum-Vol-V-No.1-Januari-2020_Putri-Hafidati.pdf
- Kartini Kartono (1996), *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Orang Dewasa*, Bandung, 14
<https://onsearch.id/Record/IOS2862.UNMAL00000000010440>
- Rudy Hartono (2016), *Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*.
<http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf>
- Samsinar, dkk (2021), peran politik kebijakan terhadap proses pelaksanaan dan penilaian pendidikan islam, jurnal literasiologi, vol. 6 no. 2. 90
<https://www.neliti.com/id/publications/556573/peran-politik-kebijakan-terhadap-proses-pelaksanaan-dan-penilaian-pendidikan-isl>
- Zaini Tamin, Dkk (2018), *Politik Pendidikan (Konsep Dan Praktik Kebijakan Pendidikan Diindonesia)*, Cv Dwiputra Pustaka Jaya. 41
https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OGViNWRhOGVjMjBkODFiZTE4YTg5YjBhMDJmYTU0NGVmODdjODkyNA==.pdf